

CONVERGENCE: JOURNAL OF GLOBAL DYNAMICS

Program Studi Hubungan Internasional, UIN Alauddin Makassar

ISSN: 3109 –4228 (Print) | e-ISSN: 3109 –4198 (Online)

KEGAGALAN DIPLOMASI LINGKUNGAN DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN PLASTIK GLOBAL TAHAP INC-5

Haifa Avifattus Sholihah¹, Mutia Hariati Hussin²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Email: haifaavifattus@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Email: mutiahussin.suryo@umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis alasan di balik gagalnya pembentukan perjanjian plastik global pada Intergovernmental Negotiating Committee 5 pada tahun 2024, sesuai dengan mandat yang telah disepakati dalam UNEA sebagai bagian dari proses pembentukan rezim internasional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan INC-5, dengan menganalisis pengaruh kepentingan nasional serta faktor politik, ekonomi, tekanan industri, dan diplomatik yang memicu perpecahan diantara negara-negara peserta. Penelitian ini menggunakan teori rezim internasional untuk menjelaskan kegagalan dalam pembentukan rezim internasional mengenai polusi plastik global dan model aktor rasional untuk menganalisis kecenderungan negara-negara dalam proses perundingan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan kolektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya proses pembentukan rezim menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya kesepakatan. Di sisi lain perbedaan kepentingan nasional antar negara sangat berpengaruh terhadap berjalannya pembentukan rezim. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami faktor-faktor kegagalan tersebut serta mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam pembentukan rezim polusi plastik global.

Keywords: Perjanjian Plastik Global; Intergovernmental Negotiating Committee; Rezim Internasional; Model Aktor Rasional; Tata Kelola Polusi Plastik

PENDAHULUAN

Pencemaran yang disebabkan oleh plastik menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan mulai dari meningkatnya biaya untuk pengelolaan limbah, terganggunya pasokan, hingga hilangnya pendapatan dari industri kelautan dan wisata. Isu ini menyebabkan ketegangan ketika negara-negara berdebat mengenai tanggung jawab sejarah, pembagian beban, dan cara kerja sama global yang paling adil untuk mengatasi krisis plastik. Selama beberapa tahun, isu mengenai polusi plastik menjadi isu utama yang dibahas dalam Majelis Lingkungan Hidup Persyarikatan Bangsa Bangsa (PBB), sampai pada resolusi *United Nations Environment Assembly* (UNEA) yang ke 5 tahun 2021 di Jenewa. Setelah konferensi tingkat Menteri mengenai sampah laut dan polusi plastik, Peru dan Rwanda mengajukan rancangan resolusi untuk membentuk rezim polusi plastic. Sebanyak 175 negara sepakat mengadopsi resolusi bersejarah “End Plastic Pollution” yang menugaskan Direktur Eksekutif UNEP membentuk *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) untuk merancang perjanjian hukum internasional yang mengatasi polusi plastik secara menyeluruh dari hulu ke hilir (Geneva Environment Network, 2025).

Resolusi yang dihasilkan UNEA (5/14) disebut “*Plastic Pollution Resolution*”, fokus utamanya adalah membahas pendekatan komprehensif mengenai seluruh siklus hidup plastik, termasuk produksi, desain, dan pembuangannya, mulai dari sumbernya hingga berakhir di laut. Pengadopsian resolusi ini menjadi penutup dalam pertemuan UNEA-5.2 (Bahraini, 2022). Rangkaian INC dimulai dengan INC-1 yang dilaksanakan di Punta del Esta, Uruguay pada 28 November hingga 2 Desember tahun 2022. Target utamanya adalah membangun fondasi untuk menghasilkan draf akhir, fondasi ini membahas mengenai struktur kerja, pembentukan *Rules of Procedure* sebagai proses penetapan keputusan sekaligus mengidentifikasi isu prioritas, (International Pollutants Elimination Network, 2022). INC-2 yang bertempat di Paris, dilaksanakan pada 29 Mei hingga 2 Juni tahun 2023, membahas instrumen hukum internasional mengenai polusi plastik, menargetkan pengembangan substansi perjanjian menggunakan *Options Paper* sebagai panduan. (High Ambition Coalition to End Plastic Pollution (HAC), 2023).

INC-3 di Nairobi pada 13 November hingga 19 November tahun 2023, mulai menyusun rancangan awal, berdasarkan Options Paper dari INC-2, yang menjadi

tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara-negara peserta mulai membahas draf perjanjian pertama secara nyata, yang disebut zero draft. (Whiting & Pomeroy, 2023). INC-4 di Ottawa pada 23 April hingga 29 April tahun 2024, mengkaji mengenai pembahasan pada hasil dari perjanjian hukum internasional sebelumnya dan menyiapkan dasar perundingan akhir di INC-5. Tujuan utama INC-4 adalah mulai menyepakati isi pasal-pasal penting, seperti pengurangan produksi plastik, pembatasan bahan kimia berbahaya, tanggung jawab produsen dan mekanisme pendanaan bagi negara berkembang (*Extended Producer Responsibility*). INC-5 berlangsung pada 25 November hingga 1 Desember 2024 di Pusat Pameran dan Konvensi Busan, Republik Korea. Isu utama pada pertemuan ini berfokus pada menciptakan Perjanjian Plastik Global final. Perundingan global ini diharapkan menjadi pertemuan terakhir bagi negara-negara di dunia untuk menyepakati target pengurangan produksi plastik secara global, melalui *sustainable plastic world*, yang membahas mengenai pengendalian produksi plastik, pengaturan standar global mengenai komposisi plastik, mengatur sistem daur ulang limbah plastic, memberikan tanggung jawab penuh kepada industri produsen terhadap seluruh siklus hidup limbah plastik (Gong, et al., 2024).

INC-5 berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan terkait perjanjian plastik global. Hal ini bertentangan dengan mandat resmi yang tercantum dalam Resolusi UNEA-5. 2, yang dengan jelas menyatakan bahwa proses INC 5 sebagai tenggat waktu akhir untuk pengesahan kesepakatan global. Namun pada kenyataannya, INC-5 berakhir tanpa adanya kesepakatan maupun Solusi karena banyaknya konflik kepentingan didalamnya. (Center for International Environmental Law , 2024). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan mengapa *Intergovernmental Negotiating Committee-5* mengalami kegagalan, dengan cara menganalisis pengaruh kepentingan nasional, mengidentifikasi faktor politik, ekonomi, tekanan industri dan diplomatik yang memicu perpecahan diantara negara peserta. Analisis ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana berbagai faktor saling berkaitan sehingga menghambat jalannya negosiasi. Penelitian ini berfokus pada dinamika negosiasi di INC-5 yang membuat proses tersebut tidak dapat memenuhi batas waktu, termasuk memahami siapa saja pihak yang terlibat, kepentingan yang mereka bawa, serta pertikaian yang memicu perpecahan dalam negosiasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk di-review. Penelitian pertama ditulis Ruth Jebe dan Susan Park berjudul *The U.N. Global Plastics Treaty: How Narrative Shapes Global Environmental Policy* (Jebe & Park, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan isu sampah plastik dalam konteks Perjanjian Global Internasional dalam forum *Intergovernmental negotiating Committee (INC)*, dengan tujuan membentuk aturan global yang mengikat secara hukum untuk mengatasi polusi plastik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Artikel ini mengidentifikasi tiga isu naratif utama yang memecah jalannya negosiasi. Pertama, naratif bahwa “*plastic is the villain*” “*plastic is the victim*” “*plastic is the hero*”, Konflik antara ketiga narasi ini menyebabkan fokus negosiasi bergeser dari tujuan utama, yaitu pengolahan polusi plastik menjadi debat ideologis dan kepentingan politik yang memicu perpecahan diantara pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, proses negosiasi gagal mencapai kesepakatan yang substansial.

Penelitian kedua ditulis oleh Joanna Vince, Bethanie Carney Almroth, Natalia de Miranda Grilli, Vaibhavi Dwivedi, Aleke Stöfen-O’Brien, dan Josefa Beye yang berjudul *The Zero Draft Plastics Treaty: Gaps and Challenges* (Vince, et al., 2024). Jurnal ini menjelaskan tentang awal mula *Zero Draft* sebagai kerangka dasar dalam forum negosiasi *Intergovernmental Negotiation Committee*. *Zero Draft* dibuat pada INC-3 namun masih memerlukan revisi lebih lanjut, sehingga disempurnakan pada INC-4. Rancangan *Zero Draft* menjadi landasan utama dalam upaya dunia untuk menanggulangi polusi plastik. Meski begitu, sejumlah persoalan masih belum terselesaikan dan diperkirakan akan menjadi pembahasan utama pada pertemuan INC ke-5 yang saat ini masih berjalan.

Penelitian ketiga berjudul *Challenges for a Sustainable Plastic World after INC-5* karya Ji Seop Gong, Ji Won Kim, Bomi Yoon, Jieun Kang, Jiyoun Lee, dan Yoon-Hyeong Choi (Gong J. S., et al., 2024). Jurnal ini membahas mengenai INC-5 yang menjadi pertemuan terbesar setelah *Paris Agreement* yang diikuti oleh 175 negara, demi membentuk kesepakatan global mengakhiri polusi plastik. Fokus pembahasan jurnal ini mengenai solusi terhadap krisis plastik, memerlukan kerja sama antara lembaga internasional dan sektor industri serta masyarakat. Secara singkat, hasil INC-

5 menunjukkan bahwa kesepakatan akhir belum tercapai karena adanya perbedaan kepentingan antara negara-negara produsen plastik.

Penelitian keempat *The Global Governance of Marine Plastic Pollution: Rethinking the Extended Producer Responsibility System* karya Jiang Zhou dan Di Luo (Zhou & Luo, 2024). Jurnal ini membahas polusi plastik di laut kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem, sehingga dibutuhkan pengelolaan global yang lebih tegas. Resolusi UNEA-5 tahun 2022, “*End Plastic Pollution Towards an International Legally Binding Instrument*” menandai langkah dunia menuju aturan hukum internasional yang mengikat. Sistem *Extended Producer Responsibility* (EPR), untuk menjaga kesehatan manusia, kelestarian laut, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya laut yang berkelanjutan.

Penelitian kelima adalah *INC-5 Booklet* karya Sirine Rached (Rached, 2024). Penelitian ini membahas rancangan *Chair’s non-paper* yang dianggap terlalu lemah dan berpihak pada kepentingan industri serta negara produsen plastik. GAIA menegaskan, perjanjian plastik global harus mengatur seluruh proses. GAIA juga menolak solusi semu seperti *plastic credit* atau *chemical recycling* yang dianggap tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, GAIA mendorong sistem *reuse* dan *refill* serta ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai fokus utama tentang kegagalan pembentukan rezim melalui forum INC di mana analisis di fokuskan kepada dua factor utama, yaitu rezim INC yang lemah secara prinsip, norma, aturan, procedure sehingga, menimbulkan banyak konflik yang bisa dilihat melalui, rasional aktor model atau negara yang saling bersaing dan berfikir rasional mengenai kepentingan mereka untuk mempengaruhi hasil dari perjanjian plastik global tersebut agar tidak merugikan mereka.

KERANGKA TEORI

Peneliti menggunakan Teori Rezim Internasional (*Regime Theory*) sebagai landasam analisis dalam penelitian ini. Menurut Stephen D. Krasner (Stephen D. Krasner, 1982), rezim internasional adalah suatu tataran yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit

yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan mernuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Prayuda, Harto, & Gunawan 2019). Teori Rezim Internasional hanya akan berfungsi jika empat elemen utamanya yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan telah disetujui dan diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Dalam mandat pembentukan INC dijelaskan bahwa fondasi rezim sudah ada, namun secara teoritis rezim tersebut belum tergolong kuat karena elemen-elemen kunci didalamnya belum terpenuhi dengan baik.

Prinsip-prinsip dasar rezim seperti komitmen untuk mengurangi produksi plastik, pembatasan pada bahan kimia, dan tanggung jawab produsen belum mencapai tingkat kesepahaman yang kolektif. Norma-norma bersama juga mengalami kegagalan karena negara-negara penghasil minyak, industri petrokimia, dan negara yang bergantung pada plastik menolak adanya perubahan struktural yang dapat merugikan kepentingan mereka. Sementara itu, aturan dan prosedur pengambilan keputusan dalam INC terhambat oleh politik veto tersembunyi, pemblokiran agenda, serta terjadinya fragmentasi dalam kelompok negosiasi (Arif, 2025).

Peneliti juga menggunakan Teori Rasional Aktor Model, yang menggambarkan rasionalitas "pilihan yang memaksimalkan nilai secara konsisten dalam batasan tertentu". Bahwa negara bertindak sebagai satu entitas yang berusaha memaksimalkan kepentingannya melalui analisis logis terhadap situasi politik global (Lovel, 1970). Tujuannya adalah untuk mempelajari seberapa tepat model proses pembuatan keputusan rasional untuk menguji keputusan dan perilaku dari seorang pemimpin dalam krisis Internasional. Masing-masing proses pembuatan keputusan negara bisa dipandang seolah-olah mereka aktor tunggal pembuat keputusan, masing-masing aktor tunggal membuat pilihan yang rasional. Jika negara mengasumsikan pemerintah serupa dengan individu-individu rasional yang memiliki nilai seperti kalkulasi biaya, keuntungan, tujuan, dan sebuah komando taktik yang instrumental. Mereka membentuk tujuan, mengumpulkan informasi, menimbang resiko, kemudian memilih dan mengimplementasi sebuah rencana secara rasional (Affianty, 2015).

Dalam konteks gagalnya INC-5 untuk mencapai kesepakatan mengenai plastik global, model Aktor Rasional yang dikemukakan oleh Allison dapat membantu menggambarkan alasan dibalik kebuntuan perundingan tersebut. Setiap negara membawa pertimbangan kepentingan sendiri dan bertindak seolah-olah sebagai aktor tunggal yang berusaha mengoptimalkan keuntungan nasional. Daripada berkolaborasi untuk menemukan solusi atas krisis plastik global, banyak negara lebih memilih untuk fokus pada kepentingan dalam negeri mereka mulai dari aspek ekonomi, ketergantungan industri pada plastik, hingga kekhawatiran mengenai dampak regulasi internasional terhadap pertumbuhan nasional. Perbedaan dalam motivasi dan tujuan ini menyulitkan negara-negara untuk mencapai konsensus mengenai isu-isu sensitif seperti pengurangan produksi plastik, regulasi bahan kimia berbahaya, dan tanggung jawab para produsen. Dengan cara lain, kegagalan INC-5 dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perilaku rasional setiap negara yang memilih untuk mempertahankan kepentingan nasional daripada berkompromi untuk kepentingan lingkungan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif, yang berfokus pada bentuk suatu fenomena, proses kebijakan terbentuk, peristiwa, atau perilaku aktor sosial secara mendalam dan menyeluruh dalam suatu kasus. Sumber data dari penelitian bersumber dari berita, artikel, jurnal, situs resmi, serta dokumen online yang berkaitan dengan penelitian ini memahami secara mendalam penyebab kegagalan INC-5 dalam merumuskan *Global Plastics Treaty*. Fokus utama adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan dalam INC-5, seperti dominasi kepentingan nasional, lemahnya koordinasi antarnegara, serta kurangnya perhatian terhadap tanggung jawab bersama dan praktik berkelanjutan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution merupakan perundingan yang dibentuk untuk menciptakan aturan secara hukum internasional, mengenai seluruh siklus hidup plastik dari hulu hingga hilir. Perundingan ini bertujuan untuk merumuskan terbentuknya rezim internasional yang mencakup prinsip, norma,

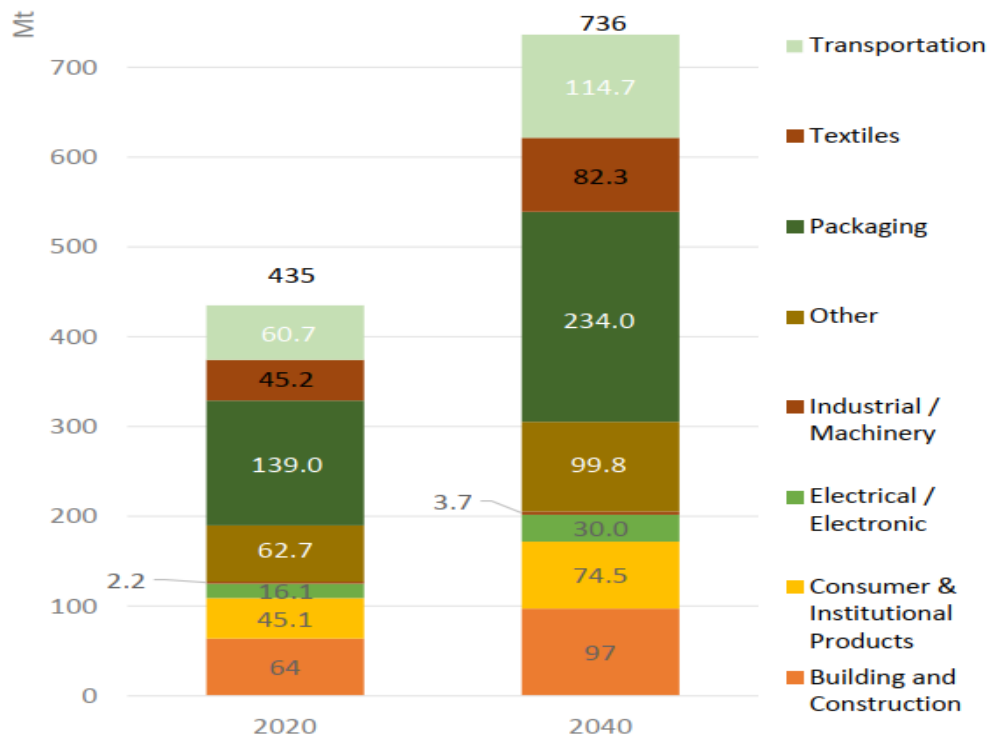
aturan, dan prosedur dalam penanganan polusi plastik global. Kerja sama ini berlandaskan pada kesadaran global yang menunjukkan bahwa pencemaran plastik telah memberikan dampak besar, tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi serta interaksi antar negara. Masalah pencemaran plastik yang melampaui batas negara membuat dampaknya dirasakan di berbagai negara, terutama bagi yang memiliki kemampuan pengelolaan limbah yang terbatas.

Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika pembentukan *Intergovernmental Negotiation Committee* dan kemajuan negosiasi di INC-1, INC-2, INC-3, dan INC-4. Pemahaman tentang proses ini krusial karena dinamika yang muncul pada tahap awal negosiasi memengaruhi pola interaksi, perbedaan kepentingan, dan arah negosiasi antar negara, yang akhirnya berkontribusi pada kegagalan INC-5 dalam mencapai kesepakatan guna membentuk Perjanjian Plastik Global yang memiliki kekuatan hukum.

Perkembangan Isu Polusi Plastik Global sebagai alasan dibentuknya Perjanjian Internasional

Polusi plastik merupakan komponen utama dari limbah di dasar laut, terutama karena sifatnya yang ringan, dan proses penguraian yang sangat lambat. Seiring waktu, plastik berukuran besar atau makroplastik akan mengalami fragmentasi menjadi partikel yang lebih kecil atau mikroplastik, dan berdampak pada meningkatkan jumlah bahan pencemar dalam lingkungan serta memperluas jangkauan organisme yang terpapar. Salah satu dampak buruk mikroplastik bagi manusia adalah terganggunya sistem imun. Partikel ini dapat mengubah DNA, menyebabkan stres oksidatif, dan menjadikan manusia lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Selain itu, kandungan Bisphenol A (BPA) yang ada pada produk plastik bisa mengganggu fungsi hormon alami pada manusia. Ini dapat berdampak negatif terhadap sistem reproduksi serta mempengaruhi kualitas dan jumlah sperma (Aditya, 2022).

Gambar 1. *Packing, textiles and transportation will drive growth in plastics production and use*

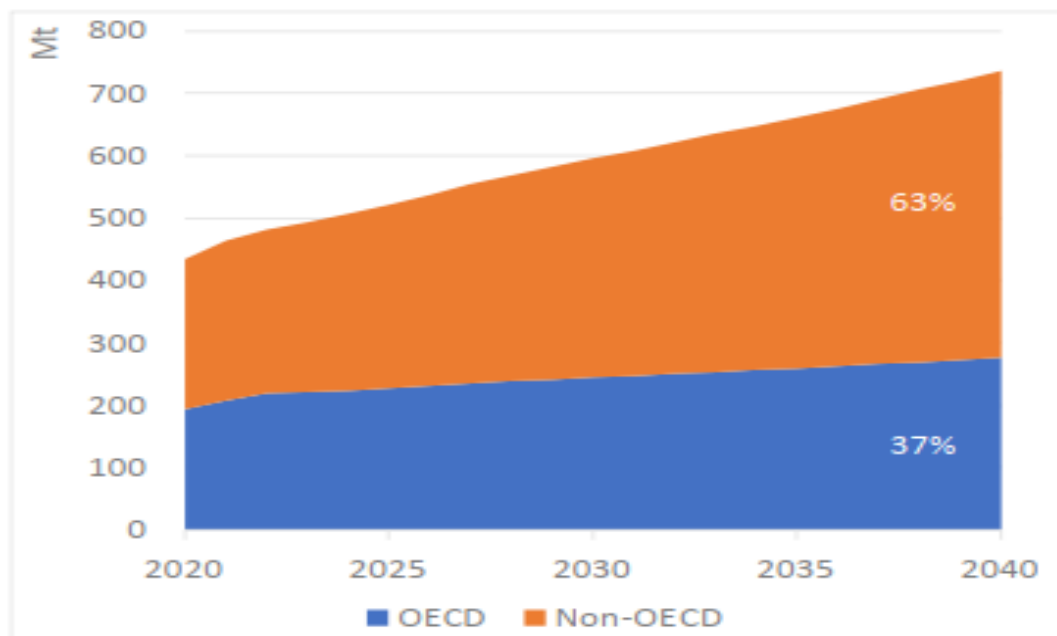


Sumber: Dellink & Buzzi (2024), *Policy Scenarios for Eliminating Plastic by 2040*, OECD Publishing

Data tersebut menjelaskan perbandingan penggunaan jumlah plastik dalam pengemasan, tekstil, dan transportasi yang mendorong pertumbuhan produksi serta penggunaan plastik. Produksi dan penggunaan plastik global digambarkan dalam juta ton (Mt) menurut aplikasi (panel kiri), dan menurut polimer (panel kanan), pada tahun 2020 dan 2040. jumlah limbah plastik terus meningkat dengan cepat jika tidak ada kebijakan yang mengikat secara hukum, diperkirakan, produksi limbah plastik secara global akan naik dari 360 juta ton di tahun 2020 menjadi 617 juta ton di tahun 2040. Jika plastik tidak dikelola dengan baik diperkirakan jumlah limbah tersebut akan meningkat dari 81 juta ton pada tahun 2020 menjadi 119 juta ton pada tahun 2040, seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 1. 3, panel kiri (Dellink & Buzzi, 2024).

Peran plastik yang semakin berkembang dalam ekonomi, bersamaan dengan perhatian yang terus tumbuh dari publik, ilmuwan, dan pembuat kebijakan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh plastik, telah menghasilkan pengawasan terhadap efek kesehatan, lingkungan, serta isu sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan seluruh siklus hidup plastik. Di satu sisi, plastik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terlihat dari penggunaannya yang luas dalam produk kemasan, alat medis pelindung, atau sebagai bahan ringan pada kendaraan. Namun, di sisi lain produksi, penggunaan, dan pembuangan plastik memiliki konsekuensi negatif yang serius untuk lingkungan, kesehatan manusia, serta ekonomi dan mata pencaharian kita.

Gambar 2. *Plastics use is projected to grow by more than two-thirds worldwide.*



Sumber: : Dellink & Buzzi (2024), *Policy Scenarios for Eliminating Plastic by 2040*, OECD Publishing.

Grafik dalam gambar 2 diatas menggambarkan bahwa penggunaan plastik global mengalami peningkatan dari sekitar 435 juta ton pada tahun 2020 menjadi ± 736 juta ton pada tahun 2040, di mana negara non-OECD menjadi kontributor utama dengan porsi yang terus meningkat hingga sekitar 63%, sementara negara OECD juga mengalami kenaikan namun dengan proporsi lebih kecil sekitar 37%. Hal tersebut mencerminkan bahwa laju pertumbuhan penggunaan plastik lebih pesat terjadi di negara berkembang yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan

ekonomi, dan peningkatan standar hidup, sedangkan negara maju tetap mengalami peningkatan tetapi dengan laju yang lebih lambat (Dellink & Buzzi, 2024).

Pada bulan Maret 2022, sebanyak 193 Negara Anggota PBB sepakat untuk mengambil keputusan guna merancang instrumen internasional yang mengikat secara hukum berkaitan dengan pencemaran plastik, termasuk di lautan, berdasarkan pendekatan menyeluruh yang mengatasi seluruh siklus hidup plastik. Meskipun sudah ada kebijakan namun, hal ini belum cukup untuk mengubah secara signifikan pola dari pencemaran plastik tersebut. Instrumen hukum yang akan dibentuk ini menyediakan kesempatan untuk memperkuat inisiatif agar mendorong respons global terhadap masalah pencemaran plastik. (Dellink & Buzzi, 2024).

Resolusi yang telah disetujui mencakup pembentukan Intergovernmental Negotiating Committee yang akan dimulai pada tahun 2022. Tujuan utamanya adalah menyusun draf perjanjian global yang mengikat secara hukum, dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2024 atau bertepatan pada putaran kelima. INC-1 berlangsung di Punta del Este, Uruguay pada bulan November hingga Desember 2022, INC-2 berlangsung di Paris, Prancis pada bulan Mei hingga Juni 2023. INC-3 dilaksanakan di Nairobi, Kenya pada bulan November 2023, dan INC-4 diadakan di Ottawa, Kanada pada bulan April 2024. Sementara itu, INC-5 diadakan di Busan, Korea Selatan pada bulan Desember, yang direncanakan menjadi tahap akhir negosiasi sebagai tenggat waktu dalam menciptakan perjanjian plastik global yang mengikat secara hukum internasional (United Nations Environment Programme, 2025).

Dinamika Perundingan pada INC-1

INC-1 merupakan pertemuan pertama dalam proses penyusunan Perjanjian Plastik Global yang diselenggarakan di Punta del Este, Uruguay, pada 28 November–2 Desember 2022. Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi negara-negara anggota untuk memulai perundingan mengenai pembentukan instrumen internasional yang mengikat secara hukum dalam upaya mengatasi polusi plastik. Sesuai mandat Resolusi 5/14 Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEA), perjanjian yang dirundingkan diharapkan mampu menangani permasalahan plastik secara menyeluruh sepanjang siklus hidupnya, mulai dari produksi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah (Secretariat of the Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution, 2022).

INC-1 bertujuan mengidentifikasi isu-isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan dalam putaran negosiasi selanjutnya. Dalam pertemuan ini, negara-negara peserta menyampaikan berbagai pandangan terkait substansi perjanjian yang akan dibentuk. Sejumlah isu yang mendapat perhatian meliputi kebutuhan pendanaan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas bagi negara berkembang agar mampu melaksanakan kewajiban yang nantinya disepakati. Di samping itu, pembahasan juga mencakup upaya pengurangan plastik sekali pakai pengendalian bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam produk plastik, peningkatan transparansi informasi mengenai komposisi plastik, serta pengembangan pendekatan ekonomi sirkular melalui peningkatan penggunaan kembali dan daur ulang plastik (Chasek, Wagner, & Yankey, 2022).

Proses negosiasi di INC-1 diwarnai oleh sejumlah perbedaan pandangan antarnegara. Perdebatan awal muncul terkait aspek prosedural, terutama mengenai hak suara organisasi integrasi ekonomi regional seperti Uni Eropa serta mekanisme pengambilan keputusan yang akan digunakan dalam proses negosiasi. Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan mengenai ruang lingkup pengendalian polusi plastik. Sebagian negara mendorong perlunya pembatasan produksi plastik sejak tahap hulu sebagai langkah utama mengurangi pencemaran, sementara kelompok negara lain lebih menekankan penguatan pengelolaan limbah dan peningkatan daur ulang (Pereira, 2022).

INC-1 belum menghasilkan rancangan perjanjian maupun kesepakatan substantif terkait isi instrumen yang akan dibentuk. Namun demikian, pertemuan ini berhasil menetapkan arah dan kerangka awal negosiasi dengan mengidentifikasi isu-isu prioritas yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Selain itu, peserta juga memberikan mandat kepada Sekretariat INC untuk menyiapkan dokumen awal atau option paper yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan pada INC-2.

Dinamika Perundingan pada INC-2

INC-2 diselenggarakan pada 29 Mei–2 Juni 2023 di Kantor UNESCO, Paris, Prancis. Tujuan utama INC-2 membahas option paper yang menjadi dokumen utama negosiasi. Dokumen tersebut memuat berbagai usulan dan pilihan kebijakan dari negara-negara anggota tanpa menetapkan satu pendekatan tertentu sebagai pilihan utama. Isu-isu yang tercantum dalam option paper mencakup pengendalian produksi

plastik, pengaturan produk plastik yang bermasalah, pengelolaan bahan kimia berbahaya dalam plastik, pengelolaan limbah plastik, mekanisme pendanaan, transfer teknologi, penguatan kapasitas, serta aspek implementasi perjanjian (International Institute for Sustainable Development, 2023).

Salah satu perdebatan utama berkaitan dengan aturan prosedur, khususnya mengenai penggunaan mekanisme pemungutan suara atau konsensus dalam pengambilan keputusan. Selain itu, negara-negara juga berbeda pandangan mengenai bentuk kewajiban yang akan diatur dalam perjanjian. Amerika Serikat, India, dan Tiongkok cenderung mendukung pendekatan bottom-up melalui penyusunan National Action Plan (NAP), yang memberikan fleksibilitas bagi masing-masing negara dalam menentukan langkah implementasi. Sebaliknya, kelompok High Ambition Coalition mendorong pembentukan kewajiban global yang lebih kuat, seragam, dan mengikat bagi seluruh negara pihak. (Margulis, 2023).

Sebagai hasil dari pertemuan ini, negara-negara peserta menyepakati bahwa seluruh opsi yang tercantum dalam option paper akan digunakan sebagai dasar penyusunan zero draft perjanjian. Selain itu, terdapat kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme pendanaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, serta penerapan National Action Plan sebagai bagian dari implementasi perjanjian di masa mendatang. Negara-negara juga menyepakati arah kerja antar-sesi menjelang INC-3 (Nøklebye, 2023). Salah satu hasil paling penting dari INC-2 adalah pemberian mandat untuk menyusun zero draft sebagai rancangan awal teks perjanjian. Dokumen ini dirancang untuk memuat berbagai opsi kebijakan sekaligus mencerminkan perbedaan pandangan yang masih ada diantara negara-negara peserta. Zero draft kemudian dijadikan dasar utama pembahasan pada INC-3.

Dinamika Perundingan pada INC-3

Pada pertemuan INC-3 yang berlangsung di Nairobi, Kenya, negara-negara peserta untuk pertama kalinya melakukan negosiasi berdasarkan Zero Draft sebagai dokumen utama pembahasan. Zero Draft merupakan rancangan awal perjanjian plastik global yang disusun dari berbagai masukan dan hasil diskusi pada INC-1 dan INC-2. Kehadiran dokumen ini menjadi perkembangan penting dalam proses perundingan

karena pembahasan tidak lagi terbatas pada penyampaian pandangan umum, melainkan sudah mengarah pada pembahasan isi perjanjian secara lebih rinci (Plassnig, 2023).

Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam INC-3 adalah pengelolaan plastik sepanjang siklus hidupnya. Pendekatan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari produksi bahan baku, desain dan penggunaan produk, hingga pengelolaan limbah setelah produk tidak lagi digunakan. Sejumlah kelompok negara, seperti High Ambition Coalition (HAC), African Group, dan Small Island Developing States (SIDS), mendukung pendekatan tersebut karena dianggap mampu menangani sumber utama permasalahan polusi plastik. Namun, beberapa negara yang memiliki kepentingan pada sektor petrokimia dan industri plastik cenderung lebih menekankan pentingnya pengelolaan limbah dan peningkatan daur ulang dibandingkan pembatasan produksi plastik (Switze & Morgera, 2023).

Dalam perundingan ini, konsep Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi salah satu isu yang dibahas. Konsep tersebut menempatkan tanggung jawab kepada produsen atas produk plastik yang dihasilkan hingga akhir masa pakainya, termasuk pengumpulan, pengelolaan, dan daur ulang limbah. Selain itu, negara-negara peserta membahas pendanaan, transfer teknologi, dan kerja sama internasional. Negara berkembang menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian tidak hanya bergantung pada aturan yang disepakati, tetapi juga dukungan finansial, peningkatan kapasitas, dan akses teknologi. Namun, hingga akhir pertemuan belum terdapat kesepakatan mengenai mekanisme pendanaan.

Secara umum, INC-3 bertujuan memperjelas arah dan kerangka dasar perjanjian plastik global, mengidentifikasi kewajiban negara peserta, serta membahas mekanisme implementasi dan dukungan yang diperlukan. Hasil pertemuan ini menjadi dasar penyusunan Revised Zero Draft yang akan dinegosiasikan lebih lanjut pada INC-4 di Ottawa, Kanada. Dinamika perundingan menunjukkan perbedaan kepentingan yang cukup tajam. High Ambition Coalition (HAC), African Group, dan Small Island Developing States (SIDS) mendorong perjanjian yang mengatur seluruh siklus hidup plastik, membatasi produksi plastik primer, menghapus bahan kimia berbahaya, serta menetapkan aturan global yang mengikat secara hukum. Sebaliknya, sejumlah negara lain lebih menekankan pengelolaan limbah dan daur ulang serta menolak pembatasan produksi karena dinilai dapat memengaruhi kepentingan ekonomi nasional. Perbedaan

pandangan tersebut menyebabkan negosiasi berlangsung lambat dan belum menghasilkan kesepakatan pada isu-isu utama (Cowan, Tiller, & Maes, 2025).

Walaupun belum menghasilkan kesepakatan yang konkret, INC-3 tetap menjadi tahapan penting dalam proses perundingan perjanjian plastik global. Pada pertemuan ini, Zero Draft mulai digunakan sebagai dasar pembahasan dan posisi negara-negara terhadap berbagai isu utama semakin terlihat.

Dinamika Perundingan pada INC-4

INC-4 yang berlangsung di Ottawa, Kanada, pada 23–29 April 2024 menjadi tahapan penting dalam perundingan perjanjian plastik global. Pertemuan ini membahas *Revised Draft Text* yang disusun berdasarkan hasil INC-3. Berbeda dengan tahap sebelumnya, pembahasan dilakukan lebih mendalam terhadap pasal-pasal perjanjian yang akan menjadi dasar instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengatasi pencemaran plastik. Isu yang dibahas meliputi pengendalian polimer plastik primer dan bahan kimia berbahaya, plastik sekali pakai, mikroplastik, desain produk yang mendukung ekonomi sirkular, *Extended Producer Responsibility* (EPR), mekanisme pendanaan, transfer teknologi, serta pengelolaan limbah plastik sepanjang siklus hidupnya. Pertemuan ini bertujuan mempersempit perbedaan posisi antarnegara dan menyempurnakan rancangan perjanjian menjelang INC-5 (World Federation of Public Health Associations, 2024).

Perbedaan muncul dalam pembahasan mengenai bahan kimia dan polimer. Sejumlah negara mendukung pembentukan daftar global bahan kimia berbahaya yang harus dibatasi atau dihapuskan, sementara negara lain menghendaki pengaturannya tetap menjadi kewenangan nasional. Perdebatan serupa terjadi pada isu plastik sekali pakai dan mikroplastik. Kelompok negara HAC mendorong larangan terhadap produk plastik yang dianggap bermasalah, sedangkan kelompok negara industri memilih pendekatan yang lebih fleksibel sesuai kebijakan masing-masing negara (Earth Negotiations Bulletin, 2024).

Pada aspek pendanaan dan transfer teknologi, negara berkembang menekankan perlunya dukungan finansial, bantuan teknis, dan akses teknologi untuk melaksanakan kewajiban perjanjian. Namun, negara maju belum mencapai kesepakatan mengenai mekanisme pendanaan yang akan digunakan. Selain itu, pembahasan mengenai EPR

juga belum menghasilkan titik temu karena perbedaan pandangan antara penerapan yang bersifat wajib secara global dan pendekatan yang lebih fleksibel di tingkat nasional. Meskipun belum menghasilkan kesepakatan pada isu-isu utama, INC-4 berhasil memperjelas posisi negara-negara serta menyempurnakan struktur rancangan perjanjian sebagai dasar negosiasi pada INC-5. Namun, hingga akhir pertemuan belum tercapai kesepakatan mengenai pengurangan produksi plastik, pengaturan bahan kimia berbahaya, mekanisme pendanaan, maupun penerapan EPR, sehingga belum tersedia naskah final yang siap diadopsi sebagai perjanjian internasional (Aoki-Suzuki, Hotta, & Yagasa, 2024).

Dinamika Perundingan pada INC-5

Sejak INC-1 hingga INC-4, negosiasi perjanjian plastik global belum menghasilkan kesepakatan pada sejumlah isu penting. Meskipun pembahasan terus berkembang, perbedaan kepentingan antarnegara masih menjadi hambatan utama dalam mencapai konsensus. Salah satu isu yang belum terselesaikan adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam *Rules of Procedure*, terutama terkait penggunaan pemungutan suara apabila konsensus tidak tercapai. Selain itu, perbedaan pandangan juga terlihat pada ruang lingkup perjanjian. Sebagian negara mendorong pengaturan seluruh siklus hidup plastik, termasuk pembatasan produksi, sementara negara lain lebih menekankan pengelolaan limbah dan daur ulang (International Union for Conservation of Nature, 2024).

Perbedaan juga muncul dalam pembahasan pendanaan, bantuan teknis, dan transfer teknologi. Negara berkembang menginginkan komitmen yang lebih jelas dari negara maju, sedangkan negara maju cenderung mendukung mekanisme yang lebih fleksibel dan sukarela. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir INC-4 masih terdapat perbedaan mendasar mengenai arah dan bentuk perjanjian plastik global. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi kebuntuan negosiasi pada INC-5 (Reuters, 2024).

INC-5 yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan, pada 25 November–1 Desember 2024 merupakan tahap akhir negosiasi yang ditargetkan menghasilkan Perjanjian Plastik Global yang mengikat secara hukum. Pembahasan difokuskan pada

sejumlah isu utama, seperti produksi plastik primer, bahan kimia berbahaya, plastik sekali pakai, mikroplastik, pengelolaan limbah, serta pendanaan dan transfer teknologi.

Namun, perundingan masih menghadapi perbedaan pandangan antarnegara. Kelompok High Ambition Coalition (HAC), African Group, dan Small Island Developing States (SIDS) mendorong pembatasan produksi plastik, sedangkan negara-negara produsen minyak dan petrokimia lebih menekankan pengelolaan limbah dan menolak pembatasan produksi. Perbedaan juga terlihat dalam pembahasan pendanaan, transfer teknologi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Meskipun menghasilkan *Chair's Text* sebagai dasar negosiasi lanjutan dan memperjelas posisi masing-masing negara, INC-5 belum berhasil mencapai target utamanya. Hingga akhir pertemuan, belum ada kesepakatan mengenai pengurangan produksi plastik, pengaturan bahan kimia berbahaya, maupun mekanisme pendanaan sehingga perundingan harus dilanjutkan pada tahap berikutnya (Chasek, Wagner, & Erdenesaikhan, 2024).

Lemahnya Kesepakatan Dalam Proses INC-5

Kegagalan INC 5 dalam menyelesaikan perjanjian plastik global disebabkan oleh lemahnya proses dalam pembentukan rezim, dari aspek prinsip, rezim plastik global yang dibahas dalam Intergovernmental Negotiating Committee masih menghadapi kendala karena belum adanya kesepakatan mengenai pendekatan utama dalam menangani polusi plastik. Salah satu prinsip yang banyak didorong adalah *Extended Producer Responsibility*, yang menempatkan tanggung jawab pengelolaan plastik pada produsen sepanjang siklus hidup produk. Namun, negara-negara peserta masih berbeda pandangan. Sebagian negara mendorong pengurangan produksi plastik secara global, sedangkan negara lainnya lebih menekankan peningkatan daur ulang dan pengelolaan limbah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar yang menjadi fondasi perjanjian belum disepakati secara bersama.

Ketidaksepakatan tersebut juga memengaruhi pembentukan norma dalam rezim plastik global. Hingga kini, belum ada kesepakatan mengenai tanggung jawab produsen, perubahan sistem produksi plastik, maupun penerapan pendekatan *full life-cycle approach*. Proses negosiasi juga dipengaruhi oleh kepentingan industri plastik, petrokimia, dan bahan bakar fosil yang berupaya mempertahankan kepentingan ekonominya. Akibatnya, norma yang diharapkan menjadi pedoman bersama masih berada dalam tahap perdebatan dan belum diterima secara luas oleh negara-negara

peserta. Kondisi ini kemudian tercermin dalam aspek aturan. Negara-negara peserta belum mencapai kesepakatan mengenai target pengurangan produksi plastik, kewajiban yang mengikat secara hukum, maupun pengaturan bahan kimia dalam plastik. Padahal, plastik mengandung ribuan bahan kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Ketiadaan aturan yang jelas menyebabkan kebijakan pengendalian polusi plastik masih berbeda-beda antarnegara, sehingga menyulitkan upaya penanganan masalah ini secara global (Thompson, Pahl, & Sembiring, 2022).

Selain itu, proses negosiasi juga menghadapi hambatan dari sisi prosedur. Mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan konsensus memungkinkan negara-negara mempertahankan posisinya dan menghambat tercapainya kesepakatan. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya *bracketed text* dalam draf perjanjian, terutama pada isu pengurangan produksi plastik, regulasi produk plastik, dan pendanaan. Di samping itu, keterlibatan ilmuwan, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat independen yang masih terbatas menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proses negosiasi. Oleh karena itu, prosedur yang digunakan dalam INC belum mampu mendorong pengambilan keputusan secara efektif dan masih menjadi salah satu hambatan dalam pembentukan rezim plastik global (Syberg, Almroth, Fernandez, & Baztan, 2024).

Konflik Kepentingan Negara dalam INC-5 sebagai bentuk model aktor rasional

Kebuntuan dalam negosiasi INC-5 terjadi karena perbedaan kepentingan antarnegara. Lebih dari 80 negara yang tergabung dalam High Ambition Coalition mendukung pembatasan produksi plastik global, termasuk pengurangan plastik sekali pakai dan pengendalian bahan kimia berbahaya. Mereka menilai tingginya produksi plastik menjadi penyebab utama pencemaran sehingga perlu dikurangi untuk melindungi lingkungan, kesehatan manusia, serta sektor ekonomi seperti perikanan dan pariwisata. Sebaliknya, negara-negara penghasil minyak dan petrokimia seperti Arab Saudi, Rusia, Iran, dan Kuwait menolak usulan tersebut karena dinilai dapat memengaruhi perekonomian mereka. Kelompok ini lebih mendukung solusi melalui pengelolaan limbah, daur ulang, dan pengembangan teknologi daripada pembatasan produksi. Perbedaan sikap tersebut juga dipengaruhi oleh kuatnya industri petrokimia di masing-masing negara. Perusahaan besar seperti SABIC, ExxonMobil, Dow, Sinopec, Reliance Industries, dan Sibur memiliki peran penting dalam investasi, ekspor,

penerimaan negara, dan penyediaan lapangan kerja. Karena itu, banyak pemerintah berupaya menjaga kepentingan industrinya dan menolak kebijakan yang dianggap dapat mengurangi aktivitas sektor petrokimia (Jee & Hötte, 2024).

Selain persoalan produksi plastik, pembahasan mengenai pendanaan dan transfer teknologi juga menjadi perdebatan. Negara berkembang meminta dukungan dana, teknologi, dan peningkatan kapasitas agar mampu menjalankan kewajiban dalam perjanjian plastik global. Sementara itu, negara maju masih berhati-hati dalam memberikan komitmen pendanaan karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepentingan domestik mereka. Perbedaan pandangan mengenai pembatasan produksi plastik, perlindungan industri petrokimia, serta dukungan pendanaan dan teknologi akhirnya menghambat tercapainya kesepakatan bersama. Akibatnya, INC-5 belum berhasil menghasilkan Perjanjian Plastik Global yang final pada tahun 2024 (Borenstein, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dinamika perundingan INC-5, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya kesepakatan perjanjian plastik global yang mengikat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu lemahnya struktur rezim internasional dan kuatnya kecenderungan negara bertindak sebagai aktor rasional dalam proses negosiasi. Dilihat dari perspektif teori rezim internasional, kelemahan tersebut tampak dari belum adanya kesepakatan, maupun kesepakatan, yang jelas terkait prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam upaya pengendalian polusi plastik global. Di sisi lain, kegagalan INC-5 juga mencerminkan perilaku negara yang cenderung rasional dalam memperhitungkan kepentingan nasionalnya. Negara-negara yang memiliki ketergantungan ekonomi pada industri plastik dan bahan baku fosil cenderung menolak kebijakan pembatasan produksi. Sementara itu, negara berkembang menunjukkan sikap rasional dengan menuntut adanya dukungan pendanaan, bantuan teknis, dan transfer teknologi sebelum menyetujui kewajiban yang lebih ketat.

Dengan demikian, kegagalan INC-5 tidak hanya disebabkan oleh, perbedaan pandangan teknis mengenai proses negosiasi dalam pembentukan kebijakan polusi plastik, tetapi juga oleh kombinasi antara lemahnya elemen rezim internasional dan dominannya rasionalitas negara sebagai aktor utama. Kondisi ini membuat tujuan awal

pembentukan perjanjian plastik global, yaitu melindungi lingkungan dan mengurangi polusi plastik secara komprehensif, menjadi kurang optimal karena tertutupi oleh kepentingan nasional dan pertimbangan keuntungan masing-masing negara dalam proses negosiasi.

REFERENSI

- Aoki-Suzuki, C., Hotta, Y., & Yagasa, R. (2024). *International Negotiating Committee (INC) on Plastic Pollution – Past Discussions and Future Perspectives*. Diambil kembali dari International Negotiating Committee (INC) on Plastic Pollution – Past discussions and future perspectives
- Chasek, P., Wagner, L., & Erdenesaikhan, D. (2024). Summary of the Fifth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution (INC-5). *International Institute for Sustainable Development (IISD) – Earth Negotiations Bulletin*.
- Jee, S., & Hötte, K. (2024). *Making intellectual property rights work for climate technology transfer and innovation in developing countries*. Diambil kembali dari <https://arxiv.org/abs/2408.12338>
- Syberg , K., Almroth, B. C., Fernandez , M. O., & Baztan , J. (2024). *Informing the Plastic Treaty negotiations on science*. Diambil kembali dari <https://link.springer.com/article/10.1186/s43591-024-00091-9>
- Aditya, R. (2022). *Fakta tentang Bahaya Mikroplastik yang Perlu Anda Tahu*. Diambil kembali dari KlikDokter: <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/fakta-tentang-bahaya-mikroplastik-yang-perlu-anda-tahu>
- Affianty, D. (2015). Analisa Politi Luar Negri. *UIN Press*, 23-26.
- Arif, A. (2025). *Peta Kepentingan Global dan Nasional di Balik Perjanjian Plastik*. Diambil kembali dari kompas: <https://www.kompas.id/artikel/peta-kepentingan-global-dan-nasional-di-balik-perjanjian-plastik-global>
- Bahraini, A. (2022). *UNEA 2022 Plastic Pollution Resolution: Satu Langkah Besar dalam Memerangi Polusi Plastik*. Diambil kembali dari weste 4 change: <https://share.google/kTQ8eR8iO7FO7rmnC>
- Borenstein, S. (2024). *In South Korea, nations meet in final round to address global plastic crisis*. Diambil kembali dari <https://apnews.com/article/plastic->

pollution-treaty-negotiations-united-nations-
3c50dd83c6ef0779f44027f02e19daee

Center for International Environmental Law . (2024). *Consensus Fails Plastics Treaty Talks in Busan*. Diambil kembali dari Center for International Environmental Law (CIEL): https://www.ciel.org/news/inc-5-conclusion/?utm_source=chatgpt.com

Chasek, P., Wagner, L., & Yankey, O. (2022). Summary of the First Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution (INC-1). *Earth Negotiations Bulletin (ENB)*, IISD Reporting Services.

Cowan, E., Tiller, R., & Maes, T. (2025). *The Rule of Three: the third session of negotiations (INC-3) on the global treaty to end plastic pollution*. Diambil kembali dari <https://link.springer.com/article/10.1007/s13412-024-00961-x>

Dellink, R., & Buzzi, E. (2024). Policy Scenarios for Eliminating Plastic by 2040. *Organisation for Economic Co-operation and Development* .

Earth Negotiations Bulletin. (2024). *Fourth Session (INC-4) – Summary Report*. Diambil kembali dari <https://enb.iisd.org/plastic-pollution-marine-environment-negotiating-committee-inc4-summary>

Geneva Environment Network. (2025). *International Cooperation on Plastic Pollution | Plastics and the Environment Series*. Diambil kembali dari [genevaenvironmentnetwork:](https://www.genevaenvironmentnetwork.org/)
<https://www.c.org/resources/updates/international-cooperation-on-plastic-pollution/>

Gong, J., Kim, J., Yoon, B., Kang, J., Lee, J., & Hyeong, Y. (2024). Challenges for a Sustainable Plastic World after INC-5 (국제 플라스틱 협약 이후 지속가능한 플라스틱 사회를 위한 도전).

High Ambition Coalition to End Plastic Pollution (HAC). (2023). High Ambition Coalition Joint Ministerial Statement INC-2. hactoendplasticpollution.org.

International Institute for Sustainable Development. (2023). *Summary report: 2nd Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, Including in the*

- Marine Environment (INC-2)*. Diambil kembali dari Earth Negotiations Bulletin (ENB): <https://enb.iisd.org/plastic-pollution-marine-environment-negotiating-committee-inc2-summary>
- International Pollutants Elimination Network. (2022). IPEN INC-1 Quick Views: A Plastic Treaty to End Plastic Pollution. *ipen.org*.
- International Union for Conservation of Nature. (2024). Guide to the fourth session of the Intergovernmental Negotiating Committee on plastic pollution (INC-4) process and rules. Diambil kembali dari IUCN.
- Margulis, C. (2023). *What happened at the Plastics Treaty INC2*. Diambil kembali dari Stop Poison Plastic: <https://m.stoppoisonplastic.org/blog/what-happened-at-the-plastics-treaty-inc2/>
- Nøklebye, E. (2023). *A global plastic treaty in the making: Updates from the second Intergovernmental Negotiating Committee (INC-2)*. Diambil kembali dari IKHAPP: <https://ikhapp.org/stories-and-research-brief/a-global-plastic-treaty-in-the-making-updates-from-the-second-intergovernmental-negotiating-committee-inc-2/>
- Pereira, L. (2022). Towards a Global Treaty to End Plastic Pollution: What Happened at INC-1? *Geneva Environment Network*.
- Plassnig, S. (2023). *Developments and challenges towards a global plastics treaty – An update from the third negotiation session in Nairobi*. Diambil kembali dari IKHAPP: <https://ikhapp.org/news-and-event/developments-and-challenges-towards-a-global-plastics-treaty-an-update-from-the-third-negotiation-session-in-nairobi/>
- Reuters. (2024). *UN talks struggle for breakthrough on plastics treaty as deadline looms*. Diambil kembali dari China Daily Hong Kong: <https://www.chinadailyhk.com/hk/article/598997>
- Secretariat of the Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution. (2022). First Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to Develop an International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution, Including in the Marine Environment (INC-1): Participants Logistics Note. Diambil kembali dari United Nations Environment Programme (UNEP).
- Switze, S., & Morgera, E. (2023). *Providing Considerations for the Next Phase of the*

- Plastics Treaty Negotiators*. Diambil kembali dari <https://oneoceanhub.org/providing-considerations-for-the-next-phase-of-the-plastics-treaty-negotiators/>
- Thompson, R. C., Pahl, S., & Sembiring, E. (2022). *Plastics treaty — research must inform action*. Diambil kembali dari Nature: <https://www.nature.com/articles/d41586-022-02201-0>
- United Nations Environment Programme. (2025). *Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution*. Diambil kembali dari <https://www.unep.org/inc-plastic-pollution>
- Whiting, K., & Pomeroy, R. (2023). *INC-3: Here's what happened at the UN global plastics treaty talks*. Diambil kembali dari [weforum.org](https://www.weforum.org).
- World Federation of Public Health Associations. (2024). *Tackling Plastic Pollution: 4th Session of the Intergovernmental Negotiating Committee Insights*. Diambil kembali dari <https://www.wfpha.org/tackling-plastic-pollution-inc-4/>.